

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
TUGAS FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB KERJA DALAM
PELAYANAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI KABUPATEN WAY KANAN**
(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)

SKRIPSI

**Oleh :
ALI ROHMAN
NPM : 1721020136**



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
TUGAS FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KERJA DALAM
PELAYANAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
JALAN DI KABUPATEN WAY KANAN**

(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh :

**ALI ROHMAN
NPM : 1721020136**

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi yang bergerak dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan dan pengairan yang baik bagi masyarakat. Jika dilihat dengan kondisi lapangan, jalan di Kabupaten Way Kanan jalan kota masih banyak yang belum diperbaiki dan tidak dapat disebut sebagai prasarana yang layak bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan. Contohnya ruas jalan penghubung Kecamatan Pakuan Ratu-Negara Batin yang ada di Way Kanan selama ini rusak parah. Padahal ruas jalan ini sangat sentral. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kinerja dari instansi yang bergerak di bidang pemeliharaan dan pengendalian jalan yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan latar belakang di atas diduga masalah tersebut disebabkan oleh kinerja dan tanggung jawab yang kurang optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan dan mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan

oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya jalan yang mengalami kerusakan dalam kurun waktu yang lama. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan *fiqh siyasah*, karena terkait permasalahan pada pendistribusian yang masih belum tepat sasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan belum berperan dengan baik dalam pembangunan.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, Tugas Fungsi, Tanggung Jawab, Infrastruktur

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Rohman

NPM : 1721020136

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan** (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)." adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Juni 2021

Penulis,



Ali Rohman

NPM. 1721020321



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Sutarmaji, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 793260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)*

Nama : Ali Rohman
NPM : 1721020136
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag

NIP. 196706041997032004

Pembimbing II

NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Naratamin, Sukrarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 701260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)*" disusun oleh **Ali Rohman, NPM : 1721020136**, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. M. Khairuddin, M.H
NPM 10221993031002

MOTTO

*“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”*

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil `Alamin. Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafaatnya. Kupersembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada:

1. Ibu dan Ayah tercinta Darmala dan Nurwawi yang telah banyak berjuang sekuat tenaga demi tercapainya pendidikan anak yang kalian sayangi ini..
2. Kepada kakak perempuanku Nursida Amanah yang selalu memberikan nasihat dan dukungannya kepadaku.
3. Kepada nenekku tersayang Rusni yang selalu memberikan dukungan moril dan juga materiil.
4. Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ali Rohman atau biasa dikenal dengan panggilan Ali/Man, dilahirkan di Gunung Sangkaran pada tanggal 12 Oktober 1998, anak terakhir dari pasangan Bapak Nurwawi dan Ibu Darmala. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Gunung Sangkaran dan lulus pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 04 Blambangan Umpu dan lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Blambangan Umpu dan lulus pada Tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juni 2021
Yang Membuat

Ali Rohman

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan** (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung).” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak, aamiin serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M.Ag. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi

penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Ayahanda Nurwai dan Ibunda Darmala yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses pendidikan ini.
8. kakak perempuanku Nursida Amanah yang selalu memberikan motivasi untuk semangat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Nenekku tersayang yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
10. Terima kasih kepada Isnaini Hatta Putri yang selalu ada dalam situasi senang dan sulit serta selalu menguatkan saat kondisi terburuk terutama selama proses pengerjaan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada pelatih silatku Nadir Syaputra yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta nasihat kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku Yad, Pitri Ayu, Marina, Nurleli, Nadila, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta saran kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku yang lain Daniel, Yudhistira Sandi, M. Oki Megananda, Dandi Maulana Fajar yang sudah membantu banyak hal selama masa kuliah ini, yang sudah banyak memberikan kontribusinya dalam skripsi ini serta memberikan saran dan motivasi yang sangat berguna selama pengerjaan skripsi.
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Siyasah angkatan 2017 khususnya Siyasah E yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

15. Terima kasih kepada Ronal Rikal dan anak-anak kos yang sudah banyak memberikan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berguna bagi penulis.

16. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 11 Juni 2021

Penulis

Ali Rohman

NPM. 1721020136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	19
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	22
C. Kerja Dalam Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i>	25
1. Pengertian Kerja Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	25

2. Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Menurut Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i>	29
D. Pembangunan Infrastruktur Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	44
1. Visi dan Misi	44
2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	45
3. Infrastruktur Kabupaten Way Kanan	46
B. Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	48
C. Pelaksanaan Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	49
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	57
B. Analisis Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Pembangunan Prasarana Jalan Di Kabupaten Way
Kanan 47

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
2. Foto Bersama Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan** (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung).”

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya.¹
2. *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Pelaksanaan berarti juga melaksanakan yaitu melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).³
4. Tugas fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.⁴
5. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁵

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2006), 1076

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Grou, 2014), 4.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), 664.

⁴ T Hani Handoko, *Manajemen, Cetakan ke 23*, (Bpfe, Jakarta), 2012, 8

⁵ Joko Widhagdo, *Ilmu Budaya dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara), 2009, 14

6. Kerja adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, dan dalam pelaksanaannya mereka harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal.⁶
7. Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berdasarkan kepemilikan kepada sesuatu.⁷
8. Perbaikan adalah hasil, perbuatan, usaha, memperbaiki.⁸
9. Infrastruktur jalan adalah sistem fisik yang menyediakan jalan dan transportasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.⁹

Berdasarkan beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai pandangan dalam aspek hukum Islam dalam mengerjakan suatu manfaat untuk memperbaiki sistem fisik penyediaan jalan dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkup sosial.

B. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan sama ada aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam ke atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, 2009, 124

⁷ Yudha Bagja Diputra, *Skripsi: Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa dan Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Hotel Arwana di Jakarta*, (Universitas Negeri Semarang, 2001), 11

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2006), 988

⁹ Kamaluddin Rustian. *Ekonomi. Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*. (Jakarta; Ghalia Indonesia), 23

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS Al Baqarah ayat 172)

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat sekalian manusia. Islam menggalakkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di dunia, namun Islam juga meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha untuk mengejar kemajuan supaya tidak berlaku sebarang kerusakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri. Oleh itu, bagi mengembalikan semula kedaulatan Negara umat Islam, maka tidak ada pilihan lain selain daripada kembali kepada ajaran Islam yang suci lagi benar.¹⁰

Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Lampung. Way Kanan merupakan kawasan yang sebagian besar terdapat lahan pertanian, perkebunan, pabrik-pabrik. Dengan banyaknya kendaraan yang keluar masuk daerah ini menyebabkan kerusakan jalan yang disebabkan volume jalan yang tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang melintas dan melebihi kapasitas. Maka diperlukan adanya pembangunan dan pemeliharaan jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Untuk membangun jalan yang baik bagi kebutuhan masyarakat diperlukan adanya kinerja yang baik dari instansi yang bergerak di bidangnya.¹¹

Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi yang bergerak dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan dan pengairan yang baik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum memiliki beberapa bidang salah satunya adalah bidang Pemeliharaan dan Pengendalian kebinamagaannya. Kemudian untuk mencapai hasil yang diinginkan diperlukan kinerja

¹⁰ Muhammad Abduh. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz 'Amma. (terj.) Muhammad Baghir. Cetakan V.* (Bandung: Mizan, 2009). 254.

¹¹ Profil Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2020.

yang maksimal dari setiap pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu instansi, sama halnya dengan instansi pemerintahan. Di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut tentunya pasti mempunyai suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kinerja yang baik dan sesuai dengan tujuan instansi, maka setiap pimpinan suatu instansi diharuskan mempunyai suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen instansi melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Jika dilihat dengan kondisi lapangan, jalan di Kabupaten Way Kanan jalan kota masih banyak yang belum diperbaiki dan tidak dapat disebut sebagai prasarana yang layak bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan. Contohnya ruas jalan penghubung Kecamatan Pakuan Ratu-Negara Batin yang ada di Way Kanan selama ini rusak parah. Padahal ruas jalan ini sangat sentral, setiap hari dilewati oleh anak sekolah, guru, tenaga kesehatan, petani, buruh PSMI dan berbagai unsur profesi lainnya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kinerja dari instansi yang bergerak di bidang pemeliharaan dan pengendalian jalan yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.¹³

Disampaikan oleh masyarakat setempat bahwa terkait dengan pengajuan perbaikan jalan sudah hampir setiap tahun diajukan ke Pemerintah Daerah baik melalui proposal atau langsung ketika musrembang. Masyarakat sekitar sudah menyampaikan keluhannya hampir setiap tahun tapi belum juga dipenuhi mungkin karena masih banyak yang lebih prioritas.¹⁴

¹² Profil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2020.

¹³ Ari Wijaya, masyarakat Kampung Pakuan Ratu, wawancara dengan Penulis, tanggal 20 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Mansyur, masyarakat Kampung Negara Batin, wawancara dengan Penulis, tanggal 20 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

Di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh pemimpin, yakni implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut akan menimbulkan Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang disebabkan adanya motivasi dari pimpinan dalam arti pimpinan memberi kebijakan atau dorongan kepada pegawai, di mana motif itu sendiri menyangkut pada kebutuhan pegawai, baik kebutuhan batiniah maupun kebutuhan lahiriah.¹⁵

Mengingat betapa pentingnya kinerja pegawai terhadap tujuan instansi, dalam hal ini adalah Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, sangat disayangkan karena pada kenyataannya kinerja pegawai dalam membangun dan memelihara kebinamargaan belum optimal. Dalam masalah ini Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas salah satunya dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas diduga masalah tersebut disebabkan oleh kinerja dan tanggung jawab yang kurang optimal dan akan melakukan penelitian tentang adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Kerja Dalam Pelayanan Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pendahuluan fokus pada tujuan dari penelitian yang akan diselesaikan. Fokus penelitian wajib dilakukan guna memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian penulis adalah pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan penghubung Kecamatan Pakuan Ratu-Negara Batin yang ada

¹⁵ Eko Maulana Ali. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*. (PT. Multicerdas Publishing : Jakarta, 2012). 21.

di Kabupaten Way Kanan (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung).

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a) Tugas Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.
- b) Tanggung jawab kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.
- c) Pelayanan perbaikan infrastruktur jalan penghubung Kecamatan Pakuan Ratu-Negara Batin yang ada di Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan oleh Dinas pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang Siyasah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Ela Susilawati, skripsi tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim tentang "Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan". Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan. Serta Apa saja kendala-kendala dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru yang berlokasi di jalan Parit Indah Nomor 06 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Bidang Bina Marga dan Masyarakat yang bermukim di drainase yang sering terkena banjir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan belum terlaksana secara maksimal. Karena masih banyak drainase yang harusnya ada tapi belum dibangun dan drainase yang sudah ada tapi kinerjanya tidak optimal karena tersumbat pasir atau tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ela Susilawati berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Ela Susilawati berfokus pada peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.

2. Penelitian Karsiman, skripsi tahun 2020 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi). Penelitian bertujuan untuk mengetahui perubahan kewenangan Dinas PU (Pusat dan daerah) pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dampak lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 terhadap organisasi dan sistem kerja Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun kesimpulan dan hasil penelitian adalah perubahan kewenangan Dinas PU (Pusat dan Daerah) pasca lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan karena salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam

melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas).

Pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR kabupaten Muaro Jambi dilihat dari UU Nomor 23 tahun 2014 pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Muaro Jambi adalah: a) Partisipasi masyarakat, b) Penggunaan dana APBD. Dampak lahirnya UU Nomor 23 tahun 2014 terhadap organisasi dan sistem kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi merupakan unsur pelaksana dan penyusun pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi merupakan pelaksanaan pembinaan teknis upaya pelayanan. Jadi, tampak bahwa pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi lebih mengarah ke wilayah teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum sedangkan Dinas Pekerjaan umum Provinsi Jambi lebih mengarah kepada program edukasi di bidang Bina Marga.

Penelitian yang dilakukan oleh Karsiman berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Karsiman berfokus pada Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.

3. Penelitian Fitri Oririana, skripsi tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh tentang “Mekanisme Komplain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam”. Penelitian ini bertujuan Untuk melihat mekanisme komplain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam serta melihat faktor penghambat yang dari proses mekanisme komplain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komplain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam sudah tersedia namun belum berjalan

sesuai dengan keinginan masyarakat, ini disebabkan karena Dinas PUPR belum menyediakan saran dan prasarana yang mendukung dalam hal mengelola pengaduan masyarakat seperti tidak tersedianya kotak saran dan pengaduan, dan web, serta adanya beberapa faktor penghambat baik itu dari segi internal maupun eksternal yang menyebabkan mekanisme komplain di Dinas PUPR belum berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Oririana berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Fitri Oririana berfokus pada mekanisme komplain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Peneliti mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 92.

¹⁷ *Ibid*, 95

bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.¹⁸

Penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²¹

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.²² Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

¹⁸ *Ibid*, 102.

¹⁹ *Ibid*, 5.

²⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

b. Data Sekunder

Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, situs-situs internet, dan Undang-Undang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan serta tokoh masyarakat Kabupaten Way Kanan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil *representative* dari keseluruhan untuk diteliti. Yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada besarnya populasi, semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.²³ Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁴

Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 10 orang yaitu 1 orang Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 1 orang Kabid Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 4 orang staff Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan

²³ Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 187.

²⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002), 244.

Umum Kabupaten Way Kanan, 5 orang tokoh masyarakat Kabupaten Way Kanan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi bisa dengan pengamatan berperan serta dan pengamatan tanpa peran serta. Dengan pengamatan akan diperoleh data yang benar-benar asli yang berasal dari spontanitas tindakan dan kewajaran dari sikap aktor. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁶

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁷

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁸

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari

²⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

²⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying, concluding*.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.²⁹

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.³⁰

Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁹ Saifullllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariaah UIN, 2006), 59.

³⁰ Saifullah, *Panduan Metodologi*, 245.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian fiqh siyasah, pengertian kerja, pengertian tugas fungsi, pengertian tanggung jawab kerja, dan pengertian infrastruktur jalan.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab kerja dalam pelayanan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³² Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat :

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul “Ilyasa” yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³³

³²Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*. (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dengan mengingat sesuai dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴ Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah.

Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.

h. Politik peperangan.³⁵

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*).
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*).
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*).
Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁶

B. *Siyāsah Dusturiyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dusturiyyah*

Siyāsah dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1, 14

³⁶ *Ibid*, 15

³⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁸

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara.”³⁹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁴⁰

Dalam *fiqh siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.⁴¹ Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan

³⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³⁹ *Ibid*, 44.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), 42

⁴¹ *Ibid*, 175.

kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁴²

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴³

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dusturiyyah*

Fiqh Siyāsah Dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d) Persoalan *bai'at*.
- e) Persoalan *waliyul ahdi*.
- f) Persoalan perwakilan.
- g) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2004), 21

⁴³ Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni : Bandung, 1971), 157.

⁴⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 23.

Persoalan *fiqh siyāsah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁵

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁴⁶

1. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyāsah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini,

⁴⁵ 'Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo, Dar al-Anshar, 1977), 25.

⁴⁶ *Ibid*, 45.

negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁷

Interpretasi adalah usaha negara untttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁴⁸

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴⁹

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan. Ketiga, tugas

⁴⁷ Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet; 3; (Bandung: Mizan, 1996), 12.

⁴⁸ *Ibid*, 15.

⁴⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 17.

mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha* "iyah").⁵⁰

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁵¹

C. Kerja Dalam Pandangan *Fiqh Siyasa*

1. Pengertian Kerja Menurut *Fiqh Siyasa*

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang *halalan thayiban* termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam.⁵²

Rasulullah, para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan pekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan menteladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Profesi nabi Idris adalah tukang jahit dan nabi Daud adalah tukang besi pembuat senjata. Jika

⁵⁰ *Ibid*, 18.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 157.

⁵² Asy'arie, Musa, *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Cetakan Kesatu*. (Yogyakarta: LESFI, 2014), 17.

kita ingin mencontoh mereka maka yakinkan diri kita juga telah mempunyai profesi dan semangat bekerja keras.⁵³

Profesi yang dikembangkan di lingkungan kita seperti profesi dosen, profesi verifikator keuangan, profesi ahli hukum, profesi laboran, profesi administratur, profesi supir, dan lainnya merupakan profesi yang harus kita kerjakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Satu langkah setelah meyakini memiliki profesi maka wajib hukumnya kita untuk bekerja keras. InsyaAllah kita akan dilimpahkan rezeki yang halal sekaligus pahala atas ibadah pekerjaan yang kita lakukan.⁵⁴

Melengkapi bekerja keras dan profesional adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah yaitu bersifat *siddiq, fathonah, amanah* dan *tabligh* agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sifat *siddiq* adalah dapat dipercaya dan jujur. Sifat *fathonah* adalah harus pintar. Sifat *amanah* adalah melaksanakan tugas yang dibebankan dan *tabligh* adalah mampu melakukan komunikasi yang baik.⁵⁵

Wujud dari kita bekerja selain mendapat rezeki halal adalah pengakuan dari lingkungan atas prestasi kerja kita. Rasulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza Wajalla” (H.R. Ahmad).

Allah juga telah menjanjikan kita mempunyai peluang memperoleh rezeki yang luas asalkan bekerja profesional dan cerdas melalui etos kerja yang tinggi. Islam telah mengajarkan bagaimana mempraktekan etos kerja yang tinggi. Ada 4

⁵³ *Ibid*, 18.

⁵⁴ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Imam Syaifudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 142.

⁵⁵ *Ibid*, 143.

(empat) prinsip etos kerja tinggi yang diajarkan Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam “*Syubul Iman*”.⁵⁶

Pertama, bekerja secara halal. Syukur Alhamdulillah kita telah memiliki pekerjaan di Unpad yang terkategori halal yaitu melaksanakan layanan pendidikan untuk masyarakat. Kedua, kita bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain apalagi menjadi benalu bagi orang lain. Makna terdalam adalah kita dilarang untuk bersifat selalu meminta imbalan diluar kemampuan lembaga tempat kita bekerja. Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Tegasnya seseorang harus mengatur rezeki yang diperoleh hasil dari memerah keringat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan menghindarkan perilaku boros. Keempat, bekerja untuk meringankan hidup tetangga. Artinya kita setelah memperoleh rezeki tidak boleh egois dan harus peduli untuk meringankan kesulitan ekonomi tetangga kita.⁵⁷

Secara alamiah di dalam kehidupannya, manusia selalu melakukan bermacam-macam aktivitas, salah satu wujud dari aktivitas itu adalah kerja atau bekerja.⁵⁸ Manusia bekerja mengandung unsur kegiatan sosial, menghasilkan barang dan atau jasa yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. Bekerja berarti melakukan suatu pekerjaan, diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan.⁵⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian. Menurut Wjs. Poerwadarminta kerja adalah melakukan sesuatu, sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha kerja adalah proses penciptaan atau

⁵⁶ Hamzah Ya'kub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 26.

⁵⁷ *Ibid*, 19.

⁵⁸ Kaswan. *Sikap Kerja Dari Teori dan Implementasi Sampai Bukti*.2014. (Bandung: Alfabeta), 4

⁵⁹ *Ibid*, 6

pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada.⁶⁰

Kerja dipandang dari sudut sosial merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat (keluarga) dan masyarakat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan, sedangkan dari sudut rohani atau religius, kerja adalah suatu upaya untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dalam hal ini, bekerja merupakan suatu komitmen hidup yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.⁶¹

Berdasarkan beberapa pengertian kerja diatas peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengertian kerja. Kerja yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah.⁶²

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*).⁶³ *Performance* bisa diterjemahkan menjadi prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, dan hasil kerja. Secara operasional kinerja dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur.⁶⁴

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

⁶⁰ Mahmud Muhammad Balily, *Etika Kerja; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 133.

⁶¹ *Ibid*, 135.

⁶² Ananto Pramadhika, "Motivasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Motivasi Kerja*, September 2011, 33.

⁶³ *Ibid*, 37.

⁶⁴ H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2005), 199.

kepadanya.⁶⁵ Menurut Prawirosentono, kinerja adalah sesuatu yang dicapai seseorang atau kelompok dalam organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara legal, dan tidak melanggar hukum, moral, dan etika. Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting yaitu :

a. Tujuan

Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personil.

b. Ukuran

Ukuran dibutuhkan untuk mengetahui apakah seorang personil telah mencapai kinerja yang diharapkan, untuk itu kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personal memegang peranan penting.

c. Penilaian

Penilaian kinerja reguler yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personil. Tindakan ini akan membuat personil untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja sesuai dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai.⁶⁶

2. Tugas dan Fungsi Tanggung Jawab Kerja Menurut Pandangan Fiqh Siyasah

a) Tugas Fungsi

Islam memandang pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Seperti yang tertulis dalam Al Quran Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

⁶⁵ *Ibid*, 201.

⁶⁶ Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala, *Managemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 837.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS Al Baqarah ayat 188).

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. "Makan" ialah "mempergunakan atau memanfaatkan", sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.⁶⁷

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain menerima harta tanpa ada hak untuk itu dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap suatu kesepakatan. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.⁶⁸

Tugas fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih

⁶⁷ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-muqtadir, *Tahdzir Al-Kiram min Mi'ah Bab Min Abwab Al-Haram*. Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, dkk. Uang Haram, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2006), 12.

⁶⁸ Ibid, 14.

rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.⁶⁹

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.⁷⁰

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

⁶⁹ Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala, *Managemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 839.

⁷⁰ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Bina Ilmu. Jakarta. 2004), 38.

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.⁷¹

b) Tanggung Jawab Kerja

Tanggung jawab dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Jadi tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.⁷²

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Demikian makna tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁷³

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Apabila ditelaah lebih lanjut, tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi, sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita.⁷⁴

⁷¹ Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. (PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001), 4.

⁷² *Ibid*, 5.

⁷³ Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 2012), 25

⁷⁴ *Ibid*, 26.

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan.⁷⁵

Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut al-Qur'an, memperhatikan QS An Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya :

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An Nisa ayat 58)

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi

⁷⁵ Ibid, 27.

"amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.⁷⁶

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.⁷⁷

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apa pun dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.
- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan

⁷⁶ Imam Jalaluddin al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat* (Terjemah), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), 424.

⁷⁷ *Ibid*, 425.

rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.⁷⁸

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷⁹

Manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggungjawab atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, serta tanggung jawab terhadap alam.⁸⁰

Kemudian S.J. Fockma Andrea dalam bukunya *Rechtsgelerd Hand woordenboek* yang dikutip Arifin P. Soeriatmadja mengatakan bahwa tanggung jawab yaitu membuat perhitungan dan pertanggung jawaban tidak sekedar menunjukkan bahwa semua penerimaan yang diharapkan telah diterima dan pengeluaran yang mana dan untuk apa (kebenaran formal dari perhitungan), tetapi juga mempertahankan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan kebenaran materiil dan pengeluaran tersebut.⁸¹ Selanjutnya tanggung jawab itu disingkat sebagai suatu kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban, dan

⁷⁸ Abbas Mahmud al-Aqqad, "*Al-insaan fi Al-Qur'an*". Penerjemaah, Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Manusia Diungkap Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 45.

⁷⁹ *Ibid*, 50.

⁸⁰ *Ibid*, 29.

⁸¹ Soeria Atmadja Arifin P, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, (Gramedia, Jakarta, 2006), 43

hingga memikul kerugian (bila dituntut) baik dalam kaitan hukum maupun administrasi.⁸²

Tanggung jawab adalah kewajiban dalam melaksanakan tugas tertentu. Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti wewenang tanggung jawab memberikan hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Menurut Djoko Widagdho menyatakan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja sesuai dengan kedudukannya.⁸³

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai tanggung jawab yaitu meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaannya
2. Mau bertanggung jawab
3. Energik
4. Berorientasi ke masa depan
5. Kemampuan memimpin
6. Mau belajar dari kegagalan
7. Yakin pada dirinya
8. Obsesi untuk mencapai prestasi yang tinggi.⁸⁴

⁸² *Ibid*, 44.

⁸³ Djoko Widagdho. *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2001), 145

⁸⁴ *Ibid*, 148

D. Pembangunan Infrastruktur Dalam *Fiqh Siyasah*

Salah satu bagian dari pembangunan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari periode sekarang, yang mana indikatornya adalah seberapa baik kualitas infrastruktur suatu negara. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara atau wilayah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi.⁸⁵

Dalam perspektif Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan budayanya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi konvensional yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.⁸⁶

Pembangunan adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada; pertama, pemanfaatan

⁸⁵ Sumadiasa. *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB BALI tahun 1993-2004*. E-Jurnal E.P Unud, Vol.5, No.7 : 2016, 3.

⁸⁶ *Ibid*, 4.

sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal dan sebaik mungkin. Kedua, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.⁸⁷

Secara umum tujuan pembangunan dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqâshid syar'iah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Falah meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS Al Mulk ayat 15).

Ayat ini menyatakan bahwa dengan sifat rahman-Nya kepada seluruh umat manusia, maka Allah bukan saja telah menyediakan seluruh sarana dan prasarana bagi manusia. Ia juga telah memudahkan manusia untuk hidup di permukaan bumi. Manusia diperintahkan Allah untuk berjalan di permukaan bumi untuk mengenali baik tempatnya, penghuninya, manusianya, hewan dan tumbuhannya.⁸⁸

Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi Oxford Dictionaries adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi.⁸⁹ Definisi infrastruktur

⁸⁷ Ibid, 5.

⁸⁸ Ibid, 6.

⁸⁹ Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, (Depok:Prenadamedia Group,2018), 1

dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya.⁹⁰

Definisi lain infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.⁹¹

Infrastruktur berkaitan pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.⁹²

Infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari public capital (modal publik) dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang meliputi: jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan.⁹³ Sedikitnya ada sejumlah manfaat infrastruktur diantaranya :⁹⁴

- a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah atau antar negara;

⁹⁰ Warsilah dan Akhmad Noor, *“Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda”*, Mimbar, Vol 31, No. 2 (Desember, 2015):359-366, 361

⁹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 1 ayat (4)

⁹² Warsilah dan Akhmad Noor, *“Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda”*, Mimbar, Vol 31, No. 2 (Desember, 2015):359-366, 362

⁹³ *Ibid*, 363.

⁹⁴ Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, (Depok:Prenadamedia Group,2018), 2.

- b. Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara;
- c. Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya;
- d. Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara;
- e. Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau negara tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, jenis Infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup :⁹⁵

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat;
- g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. Infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. Infrastruktur konservasi energi;
- l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. Infrastruktur kawasan;
- p. Infrastruktur pariwisata;
- q. Infrastruktur kesehatan;
- r. Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
- s. Infrastruktur perumahan rakyat.

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatankegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan

⁹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 5 ayat (2)

meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.⁹⁶

Analisis tentang pengaruh pembangunan infrastruktur publik terhadap pertumbuhan ekonomi makro nasional dan regional ataupun indikator ekonomi makro lainnya mempunyai kaitan erat dengan kebijakan pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian analisis tentang dampak pembangunan infrastruktur publik di Indonesia mempunyai kaitan yang erat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur publik. Dalam kaitannya dengan jenis-jenis infrastruktur, diatur dengan Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2005, Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur yaitu: infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.⁹⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.⁹⁸ Selain undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol serta Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.⁹⁹

⁹⁶ Sulistijo Sidarto dan Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi*, (Depok:Prenadamedia Group,2018), 3.

⁹⁷ *Ibid*, 6.

⁹⁸ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 ayat (4)

⁹⁹ Slamet Muljono , *Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan Intra Dan Interregional Kawasan Barat Dan Timur Indonesia: Suatu Analisis Model Interregional Social Accounting Matrix* , (Bogor: Disertasi Tidak Diterbitkan, 2010), 16

Jalan umum dikelompokkan menurut sistem (primer dan sekunder), fungsi (arteri, kolektor dan lokal), status (nasional, Provinsi dan Kabupaten atau Kota) dan kelas (diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan).¹⁰⁰ Jalan umum menurut sistem jaringan jalan, jalan primer sebagaimana dimaksud merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Dari segi fungsinya jalan umum dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri sebagaimana dimaksud merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal sebagaimana merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Sedangkan, jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.¹⁰¹

Jika dikelompokkan menurut status jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Kota, dan jalan Desa. Jalan nasional merupakan

¹⁰⁰ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 6

¹⁰¹ Slamet Muljono, *Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan Intra Dan Interregional Kawasan Barat Dan Timur Indonesia: Suatu Analisis Model Interregional Social Accounting Matrix*, (Bogor: Disertasi Tidak Diterbitkan, 2010), 20.

jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.¹⁰²

Jalan Kabupaten sebagaimana merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Serta jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.¹⁰³

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid*, 21

¹⁰³ *Ibid*, 23

¹⁰⁴ *Ibid*, 24

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Kariim

Buku

- Achmadi, Abu, Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- Adi, Rianto . *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001.
- Arifin P, Soeria Atmadja. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ashofa, Burhan. 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*,(Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007)
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Handoko, T Hani. *Manajemen*, Cetakan ke 23, Bpfe, Jakarta, 2012
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004.
- Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet; 3; Bandung: Mizan, 1996
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka, 2015).
- Kaswan. *Sikap Kerja Dari Teori dan Implementasi Sampai Bukti*.2014. Bandung: Alfabeta
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta,2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta, 2006.

Rustian, Kamaluddin. *Ekonomi.Transportasi Karakteristik, Teori, dan
Kebijakan*. Jakarta; Ghalia Indonesia.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas
Syariah UIN, 2006).

Saudjana, Nana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan
Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002).

Sidarto, Sulistijo, Budi Santoso. *Proyek Infrastruktur & Sengketa
Konstruksi*, (Depok:Prenadamedia Group,2018)

Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005).

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta:UII
Press,2005).

Syarif, Ibnu, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan
Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga, 2000

Widhagdo, Joko. *Ilmu Budaya dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara),2009.

Jurnal

Diputra, Yudha Bagja. *Skripsi: Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan
Jasa dan Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada
Hotel Arwana di Jakarta*, Universitas Negeri Semarang, 2001.

Muljono, Slamet. *Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap
Perekonomian dan Distribusi Pendapatan Intra Dan
Interregional Kawasan Barat Dan Timur Indonesia: Suatu
Analisis Model Interregional Social Accounting Matrix* , (Bogor:
Disertasi Tidak Diterbitkan, 2010)

Warsilah, Akhmad Noor, “Peranan Infrastruktur terhadap
Pertummmmbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan
Pembangunan di Kota Samarinda”, *Mimbar*, Vol 31, No. 2
(Desember, 2015):359-366

Perundang-undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa